

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Reza Marsyela

rezamarsyela582@gmail.com

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Performance-Based Budgeting Implementation, Accounting Information Systems, Performance Reporting Systems on Performance Accountability of Surabaya City Agencies at OPD (Regional Apparatus Organization) Surabaya City. This research is descriptive analysis using a quantitative approach. The type of data used is primary data. The instrument of data collection technique used questionnaires, which were distributed directly to the respondents. The population of this study were 26 Regional Apparatus Organizations in Surabaya City and the sample used in this study consisted of 1 Head of Service, 1 Head of Subdivision, 1 Finance Section. Furthermore, the data analysis technique in this research uses Multiple Linear Regression Analysis with SPSS 25, and Likert scale as the measurement scale. The results concluded that Performance-Based Budgeting had a negative effect, Accounting Information Systems had a positive effect, and Performance Reporting Systems had a negative effect on the Performance Accountability of Surabaya City Government Agencies.

Keywords: performance-based budgeting, accounting information system, performance reporting system, accountability of surabaya city government agencies performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Kota Surabaya pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Surabaya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan mengirimkan kuesioner kepada responden. Populasi penelitian ini adalah 26 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya dan sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 1 Kepala Dinas, 1 Kepala Sub Bagian, 1 Bagian Keuangan. Selain itu, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS 25 dan skala likert sebagai skala pengukuran. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh negatif, Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif, dan Sistem Pelaporan Kinerja berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

Kata Kunci: anggaran berbasis kinerja, sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan kinerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memberikan kinerja kepengurusan yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Artinya, hal itu harus dicapai melalui praktik tata kelola yang baik dan bersih. Dengan tata kelola yang baik, maka akan menimbulkan adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang direncanakan dan dilaksanakan melalui program pelayanan publik. Pemerintah terus mengembangkan inovasi agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan standar pengelolaan yang ditetapkan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja instansi.

Anggaran berbasis kinerja diukur berdasarkan pendekatan konsep *value for money*. Artinya anggaran digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pemerintah didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis dan berkomitmen untuk mencapai target dan tolak ukur yang ditetapkan oleh program sebagai standar kinerja. Implikasi anggaran berbasis kinerja diharapkan pemerintah akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara maksimal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.

Faktor Sistem pelaporan juga berperan dalam mencapai penegakan akuntabilitas atas kinerja pemerintah. Sistem pelaporan kinerja merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan kinerja semua kegiatan dan berguna untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Kewajiban pemerintah dalam sistem pelaporan adalah memberikan informasi keuangan untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Terkait kewajiban pemerintah dalam sistem pelaporan setiap instansi pemerintah wajib melaporkan atas pencapaian kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud dari implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) yang dibuat untuk meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan *good governance*.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem atau komponen yang diperlukan oleh organisasi dalam pengelolaan data tentang aktivitas organisasi yang memiliki nilai ekonomi sehingga menjadi sumber informasi akuntansi yang bermanfaat bagi penggunaannya dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan. E-sakip merupakan bentuk dari sistem informasi akuntansi pemerintah yang diaplikasikan untuk memfasilitasi proses pemantauan dan pengendalian kinerja satuan kerja di lingkungan instansi agar meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Informasi yang ada pada aplikasi E-SAKIP juga dapat diakses oleh masyarakat, dengan harapan dapat berpartisipasi memantau, mengevaluasi, dan memberikan kritikan kepada instansi pemerintah ketika kerjanya kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya; (2) Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya; (3) Apakah sistem pelaporan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya; (2) Untuk menguji dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya; (3) Untuk menguji dan menganalisis sistem pelaporan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Institusional

Teori Institusional (Teori Kelembagaan) adalah teori yang digunakan dalam suatu organisasi didasari oleh adanya desakan lingkungan institusional yang dapat mempengaruhi proses dalam organisasi. Pada teori institusional digunakan untuk mempelajari pola

hubungan perilaku individu dengan organisasi. Terdapat tiga prosedur organisasi untuk melakukan perubahan dan upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertama, isomorfisma koersif menunjukkan organisasi terbentuk karena adanya tekanan-tekanan dari organisasi lain, negara, atau masyarakat. Kedua, isomorfisma mimetik, yaitu sebuah organisasi terbentuk karena organisasi meniru organisasi lainnya yang disebabkan adanya ketidakpastian lingkungan sehingga organisasi akan cenderung menjadi versi yang sama seperti organisasi lainnya. Ketiga, isomorfisma normatif, yaitu organisasi terbentuk karena adanya tuntutan sikap profesional organisasi (Dimagio dan Powell, 1983; Nadila *et al.*, 2021). Dalam penelitiannya (Nadila *et al.*, 2021) menyatakan bahwa keadaan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan dan telah dikonfirmasi langsung oleh pejabat pemerintah setempat bahwa kegiatan pemerintahan yang dijalankan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tindakan dan keputusan organisasi yang diputuskan dipengaruhi oleh organisasi diluar organisasi tersebut. Artinya, dengan adanya tekanan eksternal organisasi berusaha untuk menjaga kepercayaan publik dan keberadaan organisasinya. Faktor tekanan eksternal tersebut dapat menjadi kontrol organisasi untuk dapat memengaruhi kinerja organisasi dengan berbagai strategi. Menarik kesimpulan, bahwa institusional merupakan sebuah sistem yang dapat membuat organisasi mengontrol hubungan antara manusia dengan lingkungan organisasinya berdasarkan aturan, norma, budaya, hukum, dan undang undang.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) adalah sistem penganggaran yang menekankan penggunaan dana untuk mencapai hasil yang optimal dari rancangan yang ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya sebagai mekanisme keterkaitan antara dana yang diberikan kepada entitas sektor publik dengan output dan/ atau outcome yang akan mereka hasilkan dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya (Illayuniga, 2019). Berdasarkan pengertian diatas, anggaran berbasis kinerja diterapkan berdasarkan hasil kinerja, yaitu output dan outcome, dan bukan berorientasi pada penyerapan anggaran (*input*). Anggaran berbasis kinerja memusatkan pada konsep pendekatan *value for money* dan pemantauan kinerja keluaran (*output*). Memprioritaskan tujuan dan pendekatan sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sistem yang dirancang saling berkaitan memiliki fungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyajikan dan mendistribusikan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan bagi pengguna dalam organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyajikan informasi keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 kemudian diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjadi dasar pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan daerah menjelaskan pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Sistem Pelaporan Kinerja

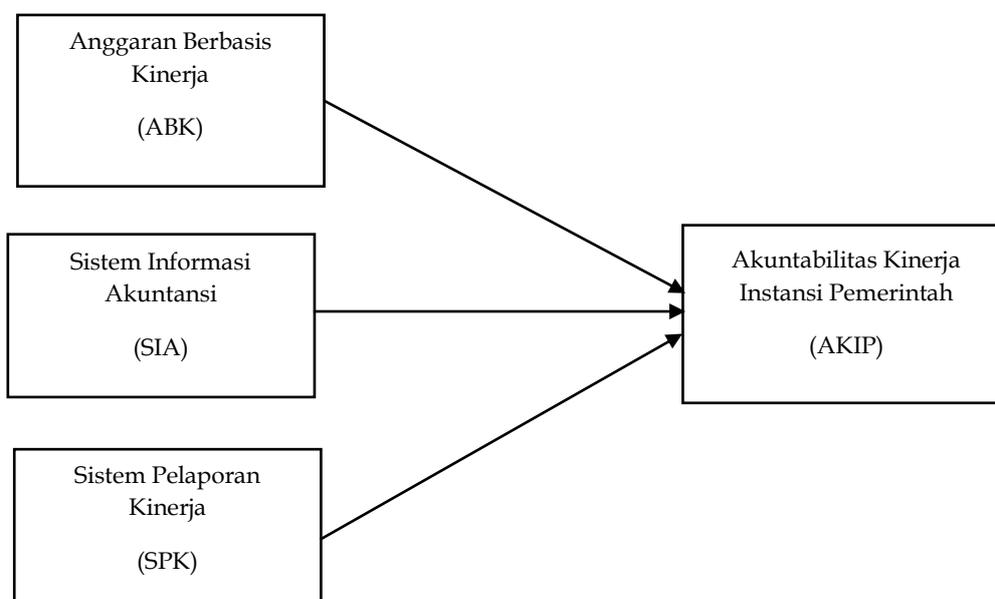
Sistem pelaporan merupakan bentuk pernyataan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kinerja seluruh kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Entitas yang diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan adalah sebagai berikut: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Unit Kerja Pemerintah, dan Unit Pelaksana Teknis kemudian pelaporan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat dan DPR. Bastian (2006) menyebutkan bahwa pelaporan kinerja organisasi sektor publik memiliki karakteristik yaitu: berfokus pada hal

penting, tujuan dan hasil saling berhubungan, menyajikan hasil sesuai dengan konteks, sumber daya dengan hasil saling keterkaitan, menyajikan informasi yang komparatif, mempertimbangkan faktor kendala. Pelaporan kinerja diimplementasikan dalam penyampaian kepada publik tentang proses kerja organisasi dan perbandingan dengan unit kerja yang sebanding.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) memaparkan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyediakan, melaporkan dan mengutarakan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun kemudian dilaporkan dalam pelaporan kinerja pemerintah. Akuntabilitas pada dasarnya adalah penyedia informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah pusat ataupun daerah harus menginformasikan kepada publik atas pemberian hak-hak publik untuk hak diberi informasi, hak untuk didengar.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya

Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem yang disusun secara teratur dalam penyusunan anggaran yang menghubungkan pengeluaran dan hasil kinerja yang dilakukan organisasi sektor publik. Anggaran berbasis kinerja sebagai alat pengendalian keuangan yang efektif mampu untuk memaparkan tujuan secara spesifik dari organisasi yang ingin dicapai sesuai dengan target sasaran perencanaan kegiatan pemerintah. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah dapat memastikan secara tepat kecocokan biaya aktual yang disusun sehingga realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan direncanakan.

H_1 : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya

Penerapan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan kinerja individu dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi dalam pemanfaatan teknologi dari sistem informasi diukur dari kemudahan dari sistem tersebut untuk dapat diakses secara mudah dan cepat oleh penggunaannya. Implementasi sistem teknologi informasi memberikan kemudahan untuk individu dan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat mencapai keberhasilan, sistem mengandalkan kepercayaan pengguna sistem informasi dari sebuah sistem yang digunakan untuk pemenuhan tugas individu dalam organisasi tersebut. Pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja organisasi adalah representasi dasar kinerja organisasi terhadap sumber daya saling bergantung dengan kinerja organisasi.

H₂: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Penerapan Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya

Penerapan sistem pelaporan kinerja merupakan prosedur yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan dituangkan kedalam laporan kinerja pemerintah. Sistem pelaporan disusun dengan baik agar dapat digunakan untuk meninjau dalam pengaplikasian anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai pemelihara dan masyarakat pemerintah daerah harus mampu menyajikan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Maka dari itu, sistem pelaporan diperlukan agar mampu menyediakan informasi secara transparan tentang keputusan yang dibuat oleh pemerintah selama periode tertentu.

H₃: Penerapan Sistem Pelaporan Kinerja Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel satu atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Pada penelitian ini populasi yang diteliti adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Surabaya dengan jumlah 26 OPD Kota Surabaya,

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *Purposive Sampling* merupakan metode untuk penentuan sampel dengan atas dasar pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang didapatkan lebih tepat. Pada penelitian ini menggunakan sampel dari populasi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Kepala bagian/dinas pada setiap OPD, Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Badan pada setiap OPD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan sebuah kuesioner disampaikan oleh peneliti kepada narasumber. Responden untuk penelitian ini adalah 1 orang kepala dinas, 1 orang kepala sub bagian, dan 1 orang akuntansi/keuangan pada masing-masing Dinas dan Badan OPD Kota Surabaya. Sehingga total responden pada penelitian ini sebanyak 78 orang dari 26 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya meliputi: 18 Dinas, 1

Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat Daerah dan 6 Badan di OPD Kota Surabaya. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu jenis data primer adalah sumber data yang mendapatkan informasi sumber pertama diperoleh peneliti melalui survei yang diambil langsung. Teknik pengukuran pada penelitian ini untuk mengukur sumber data yang diperoleh dengan menggunakan skala likert. Skala likert diaplikasikan untuk mengukur sikap, pendapat, dan tanggapan individu atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) adalah sistem penganggaran yang menekankan penggunaan dana untuk mencapai hasil yang optimal dari rancangan yang ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja diyakini mampu memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat, meningkatkan keefektifan dalam tata kelola keuangan yang lebih baik. Anggaran berbasis kinerja diyakini dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan efektivitas penganggannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sistem yang dirancang saling berkaitan memiliki fungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyajikan dan mendistribusikan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan bagi pengguna dalam organisasi. sistem pelaporan sebagai alat untuk menyajikan informasi atas aktivitas dalam implementasi anggaran terhadap pemangku kepentingan eksternal, dan internal.

Sistem Pelaporan Kinerja

Sistem pelaporan kinerja merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan kinerja semua kegiatan dan berguna untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Kewajiban pemerintah dalam sistem pelaporan adalah memberikan informasi keuangan untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Terkait kewajiban pemerintah dalam sistem pelaporan setiap instansi pemerintah wajib melaporkan atas pencapaian kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud dari implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) yang dibuat untuk meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan *good governance*. Pelaporan kinerja diimplementasikan dalam penyampaian kepada publik tentang proses kerja organisasi dan perbandingan dengan unit kerja yang sebanding. sistem pelaporan sebagai alat untuk menyajikan informasi atas aktivitas dalam implementasi anggaran terhadap pemangku kepentingan eksternal, dan internal.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun kemudian dilaporkan dalam pelaporan kinerja pemerintah. Akuntabilitas pada dasarnya adalah penyedia informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah pusat ataupun daerah harus menginformasikan kepada publik atas pemberian hak-hak publik untuk hak diberi informasi, hak untuk didengar. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan ringkasan dan gambaran data tentang variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang memuat pembuktian nilai mean, maksimum, minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengelolaan data statistik deskriptif variabel:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PABK	78	81	105	90,64	6,523
SIA	78	57	80	68,51	5,890
SPK	78	56	75	65,50	5,083
AKIP	78	51	65	56,96	4,683
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PABK) hasil ujinya menyatakan nilai *mean* sebesar 90,64. Nilai *minimum* dinyatakan sebesar 81 dan 105 menunjukkan nilai *maximum*, serta nilai standar deviasi sebesar 6,523 menunjukkan menjauhi angka 0 sehingga dapat dinyatakan bahwa penyebaran data cukup beragam. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) hasil ujinya menyatakan nilai *mean* sebesar 68,51. Nilai *minimum* dinyatakan sebesar 57 dan 80 menunjukkan nilai *maximum*, serta nilai standar deviasi sebesar 5,890 menunjukkan menjauhi angka 0 sehingga dapat dinyatakan bahwa penyebaran data cukup beragam. Variabel Sistem Pelaporan Kinerja (SPK) hasil ujinya menyatakan nilai *mean* sebesar 65,50. Nilai *minimum* dinyatakan sebesar 56 dan 75 menunjukkan nilai *maximum*, serta nilai standar deviasi sebesar 5,083 menunjukkan menjauhi angka 0 sehingga dapat dinyatakan bahwa penyebaran data cukup beragam. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil ujinya menyatakan nilai *mean* sebesar 56,96. Nilai *minimum* dinyatakan sebesar 51 dan 65 menunjukkan nilai *maximum*, serta nilai standar deviasi sebesar 4,683 menunjukkan menjauhi angka 0 sehingga dapat dinyatakan bahwa penyebaran data cukup beragam.

Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan keakuratan antara data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian dan data yang dikumpulkan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh setelah penelitian adalah data yang valid atau sah diukur menggunakan alat ukur (kuesioner). Mengukur uji validitas pada penelitian ini menggunakan kolerasi *pearson product moment*. Setiap pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid karena diukur dari membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} (dengan rumus $df = N-2$, $\alpha = 0,05$). Adapun dasar atau pedoman yang digunakan untuk penelitian ini dengan nilai signifikansi 0,05 yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan melalui uji *pearson product moment* (Ghozali, 2018) adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, artinya ada korelasi terhadap variabel yang dihubungkan; (b) Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, artinya tidak ada kolerasi antara variabel yang dihubungkan. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel 78 responden diperoleh nilai r_{tabel} (berdasarkan rumus $df = 78-2 = 76$, $\alpha = 0,05$) sebesar 0,2630. Berdasarkan pengujian validitas setiap item pertanyaan kuesioner sesuai variabel penelitian ini dapat disimpulkan bahwa $r_{hitung} > 0,2630$ maka, data tersebut dapat dikatakan valid.

Uji Realibilitas

Pada penelitian ini menggunakan pengujian realibitas dengan metode *Cronbach Alpha Coefficient* dan pengolahan data menggunakan SPSS 25. Kriteria pengujian realibitas dengan

menggunakan metode *cronbach alpha coefficient* adalah jika nilai *cronbach alpha* > 0,7 maka dinyatakan dapat diandalkan, dan jika nilai *cronbach alpha* < 0,7 maka dinyatakan tidak dapat diandalkan (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji realibilitas metode *Cronbach Alpha Coefficient* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Uji Realibilitas

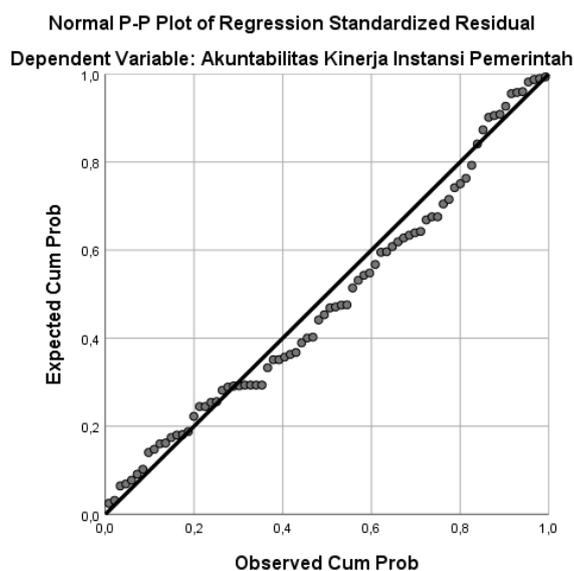
Variabel	Cronbach Alpha (α)	Koefisien Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,891	0,7	Reliabel
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,871	0,7	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi	0,870	0,7	Reliabel
Sistem Pelaporan Kinerja	0,848	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil pengujian realibilitas diatas dapat disimpulkan bahwa jika variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil uji realibilitas dengan metode *cronbach alpha* sebesar 0,891, variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,871, variabel Sistem Informasi Akuntansi sebesar 0,870, dan variabel Sistem Pelaporan Kinerja 0,848. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap item pertanyaan pada kuesioner pada penelitian ini andal (*reliable*).

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk membuktikan model regresi pada penelitian terdapat residual yang distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas dapat diukur melalui grafik *Normal Probability Plot (P-P) Plot Of Regression Standardized residual*, jika posisi data (titik) berada digaris diagonal maka dinyatakan normal. Berdasarkan pengujian normalitas maka adapun hasil uji yang diperoleh pada gambar ini:



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dilihat dari kiri bawah sampai kanan atas. Maka dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini memenuhi syarat asumsi data berdistribusi

normal. Selain itu pengujian normalitas dapat diuji melalui uji analisis statistik dengan metode statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05 sedangkan jika nilai signifikan < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil analisis *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		78	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000	
	Std. Deviation	3.82601044	
Most Extreme Differences	Absolute	.077	
	Positive	.077	
	Negative	-.048	
Test Statistic		.077	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.294	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.283
		Upper Bound	.306

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Artinya bahwa nilai signifikan 0,200 > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini data berdistribusi normal dan memenuhi syarat asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinieritas adalah metode pengujian untuk menganalisis korelasi antara variabel independen (Ghozali 2018). Model regresi dapat dikatakan tepat jika hasil uji tidak terdeteksi multikolinieritas. Multikolinieritas diukur dengan cara menghitung nilai *VIF* dan *Tolerance*. Berdasarkan asumsi multikolinieritas adalah jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 maka dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan, untuk nilai *Tolerance* < 0,10 dan nilai *VIF* > 10 maka dapat dinyatakan data tersebut terjadi multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas data penelitian ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

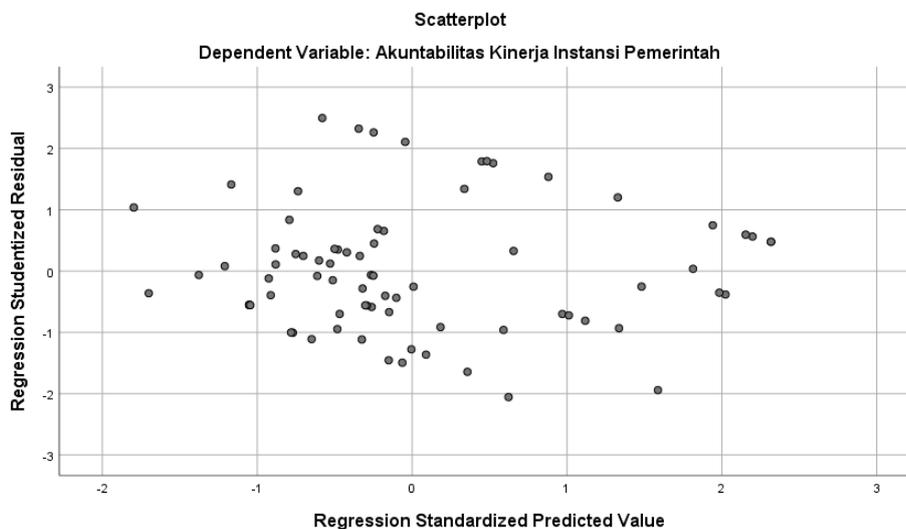
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.601	1.663
	X2	.722	1.386
	X3	.651	1.535

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas data penelitian ini menunjukkan semua variabel independen nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dinyatakan berdasarkan grafik pengukuran. Pada penelitian ini diukur dengan melihat pada grafik *scatterplot* yang memuat pola pada grafik. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3
Scatterplot

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari grafik *scatterplot* pada penelitian ini titik-titik data menyebar di sekitar angka 0 dan penyebaran pada titik-titik tidak membentuk pola dalam grafik. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda didefinisikan pengujian untuk model regresi dimana adanya hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian analisis regresi linear berganda menggambarkan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen yang menyatakan hubungan secara positif maupun negatif. Penelitian ini memperoleh data dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 26 OPD Kota

Surabaya dengan jumlah 78 responden. Adapun persamaan dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$AKIP = a + \beta_1 ABK + \beta_2 SIA + \beta_3 SPK + e$$

Keterangan :

- AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi Dari Variabel Independen
- ABK : Anggaran Berbasis Kinerja
- SIA : Sistem Informasi Akuntansi
- SPK : Sistem Pelaporan Kinerja
- E : Error

Hasil uji analisis regresi linier berganda untuk penelitian ini dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1					
	(Constant)	17.692		2.507	.014
	X1	.089	.124	1.011	.315
	X2	.353	.437	3.911	.000
	X3	.106	.115	.977	.332

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini dituangkan ke dalam persamaan dalam regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$AKIP = 17,692 + 0,088 ABK + 0,353 SIA + 0,108 SP + e$$

Interpretasi untuk pengujian regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (α) pada hasil persamaan uji regresi linier berganda sebesar 17,692. Dari nilai ini menunjukkan jika pengaruh variabel independen yakni penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem informasi, sistem pelaporan bernilai 0 (nol); (2) Pada hasil persamaan uji regresi linier berganda nilai koefisien variabel penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 0,089. Artinya bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (3) Pada hasil persamaan uji regresi linier berganda nilai koefisien variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,353. Artinya bahwa variabel sistem informasi akuntansi memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (4) Pada hasil persamaan uji regresi linier berganda nilai koefisien variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,353. Artinya bahwa variabel sistem informasi akuntansi memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinan (R²)

Pengujian koefisien determinasi (R²) menunjukkan tingkat untuk kemampuan menerangkan variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisien determinasi dinyatakan mendekati 0, maka variabel independen tidak memaparkan varibel dependen. Jika nilai koefisien determinasi dinyatakan mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa

variabel independen memaparkan variabel dependen dan model regresi dapat dinyatakan baik. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Dterminasi R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,577 ^a	,333	,306	3,902

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Sistem Informasi Akuntansi, Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,333 atau 33,3%. Artinya, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem informasi, sistem pelaporan mempengaruhi variabel dependen yakni akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya dan model regresi dinyatakan baik. Sementara itu, sisa 66,7% disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara berbarengan (simultan). Pada uji F penelitian ini tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau nilai F hitung $> F$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau nilai F hitung $< F$ tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F untuk penelitian ini dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	561.731	3	187.244	12.293	.000 ^b
	Residual	1127.153	74	15.232		
	Total	1688.885	77			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1), sistem informasi Akuntansi (X2), sistem pelaporan (X2) secara simultan (bersama-sama) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan untuk nilai F hitung sebesar $12,293 > F$ tabel (berdasarkan rumus F tabel yaitu $F_{tabel} = F(k; n-k) = F(2; 78-2) = 3; 76 = 2,72$, $\alpha = 0,05$) sehingga nilai F tabel adalah 2,72. Maka untuk nilai F hitung $12,293 > F$ Tabel 2,72 dan dapat disimpulkan bahwa H_1 berdasarkan penelitian ini diterima yakni tiga variabel independen (Penerapan anggaran berbasis kinerja, Sistem informasi, Sistem pelaporan) secara simultan (bersamaan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Uji t

Uji t memiliki tujuan untuk menentukan secara parsial pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada uji t penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t untuk penelitian ini dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17.692	7.056		2.507	.014
	X1	.089	.088	.124	1.011	.315
	X2	.353	.090	.437	3.911	.000
	X3	.106	.108	.115	.977	.332

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas dapat diketahui hasil uji sebagai berikut: (1) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya tidak berpengaruh secara signifikan hak ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,315 > 0,05 dan hipotesis pertama (H₁) ditolak; (2) Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya terdapat pengaruh secara signifikan dibuktikan dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan hipotesis kedua (H₂) berdasarkan penelitian ini diterima; (3) Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya tidak berpengaruh dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,332 > 0,05 dan hipotesis ketiga (H₃) berdasarkan penelitian ini ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji hipotesis untuk menguji Anggaran Berbasis Kinerja menunjukkan bahwa H₁ variabel Anggaran Berbasis Kinerja tidak terdapat pengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi 0,315 > 0,05. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,315 dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima yang artinya bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian ini menyatakan tidak berpengaruh variabel Anggaran Berbasis Kinerja disebabkan kemungkinan pada implementasi penganggaran berbasis kinerja sumber daya manusia belum memahami proses penerapan anggaran berbasis kinerja. Implementasi penganggaran berbasis kinerja berdampak signifikan terhadap pengendalian dan pengelolaan sumber daya serta penegakan kebijakan yang dilimpahkan kepada otoritas yang berwenang untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Penganggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan efektivitas penggunaannya berdasarkan apa yang diharapkan pemerintah daerah. Penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengharuskan laporan anggaran disusun secara tepat dan sistematis. Anggaran sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kinerja Implementasi penganggaran berbasis kinerja berdampak signifikan terhadap pengendalian dan pengelolaan

sumber daya serta penegakan kebijakan yang dilimpahkan kepada otoritas yang berwenang untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Penganggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan efektivitas penggunaannya berdasarkan apa yang diharapkan pemerintah daerah. Penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengharuskan laporan anggaran disusun secara tepat dan sistematis. Anggaran sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kinerja.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji hipotesis untuk menguji Sistem informasi akuntansi menunjukkan bahwa H_2 variabel Sistem Informasi Akuntansi terdapat pengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak yang artinya bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2022) yang menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah mampu mempengaruhi kinerja organisasi dan juga kinerja individu di dalam organisasi tersebut. Keberhasilan penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan pengguna untuk mengakses sistem dengan mudah dan cepat. Keberhasilan sistem membutuhkan kepercayaan dari pengguna sistem informasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam organisasi. Informasi akuntansi wajib disajikan secara andal dan mampu menyampaikan informasi dengan tepat agar memudahkan para pengambil keputusan. Informasi akuntansi yang disajikan secara andal dan teknologi yang dibuat oleh setiap instansi pemerintah di Kota Surabaya dapat membantu masyarakat dan pihak-pihak lain untuk menggunakan informasi keuangan dengan benar. Dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan pada setiap OPD Kota Surabaya tentunya dapat menghasilkan laporan keuangan secara tepat dan berkualitas tinggi. Teknologi informasi secara efektif digunakan dengan baik oleh para pegawai/staf dimasing-masing OPD Kota Surabaya. Maka dari itu untuk seluruh pegawai/staf perlu memahami penggunaan dari sistem informasi akuntansi pada organisasi. Semakin baik sistem informasi akuntansi yang digunakan, maka semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji hipotesis untuk menguji Sistem Pelaporan menunjukkan bahwa H_3 variabel Sistem Pelaporan tidak terdapat pengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi $0,332 > 0,05$.

Hasil nilai signifikansi sebesar 0,332 dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak dan H_0 diterima yang artinya bahwa variabel Sistem Pelaporan Kinerja tidak berpengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini yang menyatakan tidak berpengaruh disebabkan kemungkinan adanya kondisi dimana faktor eksternal dan penghambat yang perlu dikaji ulang. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) penelitian yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntabilitas Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menyebutkan bahwa Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi, Sistem Pelaporan Kinerja Apakah Ada Keterkaitannya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil temuan pada penelitian yang telah diolah dengan beberapa uji disimpulkan berikut ini: (1) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara tidak signifikansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Artinya, bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya disetiap OPD Kota Surabaya; (2) Sistem informasi akuntansi menunjukkan pengaruh positif secara signifikansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Artinya, bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang dikelola dengan memanfaatkan teknologi yang ada akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disetiap OPD Kota Surabaya; (3) Sistem Pelaporan Kinerja menunjukkan pengaruh positif secara tidak signifikansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Artinya, bahwa Sistem Pelaporan Kinerja tidak berpengaruh dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya disetiap OPD Kota Surabaya.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Keterbatasan waktu dan tenaga dan biaya, penelitian ini hanya menjabarkan sesuai dengan keadaan yang terjadi di OPD tersebut sehingga tidak dapat digeneralisasikan; (2) Pada penelitian ini data yang digunakan berdasarkan instrumen kuesioner berdasar pada persepsi jawaban responden, sehingga keputusan yang diambil hanya berdasarkan data yang telah dikumpulkan tanpa dilengkapi wawancara; (3) Pada penelitian ini proses pengambilan data melalui kuesioner adalah kurang menunjukkan pendapat responden. Hal ini dikarenakan terdapat faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Pihak Instansi Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan memberikan pelayanan lebih baik agar memudahkan bagi masyarakat; (2) Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan metode lain dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada responden saat pengisian kuesioner agar dapat memaksimalkan data yang dikumpulkan dan menambahkan jumlah sampel yang digunakan agar lebih akurat; (3) Untuk penelitian selanjutnya, agar menggunakan variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena masih terdapat faktor-faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Erlangga. Yogyakarta.
- Eko. S. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi 1* (1) : 1-14.
- Illayuniga, R. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. Andi. Yogyakarta.
- Nadila, Z, Ahyaruddin, M, dan Agustiawan. 2021. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal* 2(2): 214:223.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, S, A. dan Dewi, S, R. 2022. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review* 19 : 1-9.